



BPN Persulit Sertifikasi Aset Pemerintah

PONTIANAK—Gubernur Kalbar, Cornelis menegaskan Badan Pertanahan Nasional mempersulit pembuatan sertifikat aset-aset milik pemerintah. Kondisi tersebut menjadi penyebab daerah tidak bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

"Makin mau buat sertifikat pemerintah, makin susah. Di Landak (misalnya), entah kemana Kepala BPN-nya. Ini faktor penyebab kepala daerah tidak bisa meraih WTP," ujar Cornelis dalam seminar yang diselenggarakan BPK RI, Jumat (8/11).

Cornelis mengungkapkan persoalan muncul pada aset-aset zaman dulu. Ia mencontohkan SD Inpres, banyak bangunan yang belum memiliki sertifikat. Ketika gedung dibangun, lupa membuat surat (sertifikatnya). Keberadaan SD tersebut telah berpuluh-puluh tahun.

Cornelis berharap seluruh bupati dan walikota dapat bekerjasama dengan dewan agar bisa menganggarkan untuk menyelesaikan persoalan aset. "Karena aset tidak memiliki surat lengkap, kita tidak bisa mengejar target WTP," ungkapnya.

Wakil Kepala BPK RI, Hasan Bisri mengakui banyak persoalan aset yang dihadapi pemerintah daerah. Ia menyarankan pemerintah daerah membuat perencanaan dan menganggarkan secara bertahap untuk menyelesaikan persoalan aset tersebut. "Buat MoU dengan BPN," kata Hasan, kemarin.

Tak hanya pemerintah, aset instansi vertikal juga banyak tidak memiliki surat menyurat. Salah satunya TNI. Banyak aset

TNI yang berubah menjadi pusat perbelanjaan dan rumah mewah, karena TNI tidak memiliki dokumen resmi. Tanah TNI tersebut banyak dari okupasi dari penjajah. Ketika zaman orde baru, tidak ada yang berani mengatak-atnya. Tetapi saat ini, banyak yang berubah peruntukannya.

"Pada zaman sekarang, ketika dibawa perkara, TNI kalah. Walaupun punya bedil, kalah di pengadilan juga tidak bisa apa-apa," katanya. (uni)